

EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DI KABUPATEN BANDUNG

Leni Nurani¹, Agus Mulyanto², Hidayat³, Deden Deni Mahendra⁴, Ujang Tohiodin⁵

Sekolah Pascasarjana Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara ^{1,2,3,4,5}

Email: leninurani78@gmail.com

Nurani, Leni., dkk (2025). Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini Non-Formal di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pelita PAUD*, 9(2), 625-639.

doi: <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v9i2.4861>

Diterima: 21-06-2025

Disetujui: 25-06-2025

Dipublikasikan: 28-06-2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui angket tertutup dan terbuka yang disebarluaskan secara daring menggunakan Google Form. Sebanyak 152 satuan PAUD nonformal dari 31 kecamatan menjadi responden penelitian. Data yang diperoleh dianalisis untuk menilai tingkat keterlaksanaan implementasi kurikulum berdasarkan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek perencanaan berada dalam kategori baik (rata-rata skor 71,39), pelaksanaan dalam kategori cukup (66,15), dan evaluasi juga cukup baik (67,74). Meski begitu, ditemukan bahwa banyak guru masih mengandalkan perangkat ajar lama dan mengalami kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dan penilaian autentik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di PAUD nonformal Kabupaten Bandung belum sepenuhnya optimal. Tantangan utama meliputi keterbatasan pemahaman terhadap filosofi kurikulum, kurangnya pelatihan teknis, serta minimnya dukungan orang tua dan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan dari dinas pendidikan, serta peningkatan literasi kurikulum agar Kurikulum Merdeka dapat dijalankan secara maksimal di tingkat satuan pendidikan anak usia dini.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, PAUD Nonformal, Evaluasi Pembelajaran, Perencanaan

Abstract: This study aims to evaluate the extent to which the Merdeka Curriculum has been implemented in the planning, implementation, and evaluation of learning in Bandung Regency. This study employed a descriptive qualitative method, using closed and open-ended questionnaires distributed online via Google Forms. A total of 152 non-formal PAUD institutions across 31 districts participated in the research. The collected data were analyzed to assess the implementation level of the curriculum based on indicators of planning, implementation, and evaluation. The results showed that the planning aspect was categorized as good (average score 71.39), the implementation was moderate (66.15), and the evaluation was fairly good (67.74). However, many teachers were found to still rely on outdated lesson plans and experienced difficulties in applying project-based learning methods and authentic assessments. The findings conclude that the implementation of the Merdeka Curriculum in non-formal PAUD institutions in Bandung Regency is not yet optimal. Major challenges include limited understanding of the curriculum's philosophy, a lack of technical training, and minimal support from parents and the surrounding community. Therefore, there is a need to strengthen teacher capacity through continuous training, supervision from local education offices, and improved curriculum literacy to ensure the effective implementation of the Merdeka Curriculum in early childhood education settings.

Keywords: Merdeka Curriculum, Non-formal PAUD, Learning Evaluation, Lesson Planning

PENDAHULUAN

Perubahan global di era Revolusi Industri 4.0 menuntut sistem pendidikan di Indonesia untuk beradaptasi secara cepat dan strategis. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi pondasi penting dalam membangun karakter dan kompetensi anak yang siap menghadapi tantangan masa depan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia merancang Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, sederhana, dan kontekstual. Kurikulum ini menitikberatkan pada pembelajaran berbasis proyek, penguatan karakter pelajar Pancasila, serta diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Namun, realitas pelaksanaan di satuan PAUD nonformal menunjukkan adanya dinamika tersendiri yang belum banyak tereksplorasi. Satuan PAUD nonformal seperti Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sering kali beroperasi dalam kondisi sumber daya terbatas dan dukungan kebijakan yang belum maksimal. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka secara spesifik pada jalur nonformal. Evaluasi ini dapat menjadi dasar pemahaman akan keberhasilan maupun kendala yang dialami satuan PAUD nonformal di Kabupaten Bandung.

Jalur pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi manajemen kelembagaan, tenaga pendidik, hingga keterlibatan masyarakat sekitar. PAUD nonformal sering kali berada di bawah yayasan kecil atau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fasilitas dan akses informasi. Hal ini berdampak pada kemampuan lembaga dalam menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka. (Awwalina et al., 2024) menekankan bahwa pembelajaran berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka membutuhkan pemahaman mendalam dari pendidik dan dukungan lingkungan belajar yang memadai. Tanpa pemahaman dan keterampilan yang cukup dari guru PAUD nonformal, implementasi Kurikulum Merdeka berisiko menjadi formalitas semata. Sementara itu, kebutuhan untuk menerapkan pendekatan bermain sambil belajar serta penanaman karakter di usia dini tetap menjadi tujuan utama pendidikan nonformal. Oleh

sebab itu, perlu diteliti bagaimana kondisi aktual pelaksanaan Kurikulum Merdeka di satuan PAUD nonformal. Informasi tersebut akan memberikan gambaran penting tentang efektivitas dan tantangan kebijakan pendidikan usia dini.

Kajian dari (Junaedah et al., 2024) menegaskan bahwa model *Project Based Learning* (PJBL) yang diadopsi dalam Kurikulum Merdeka dapat meningkatkan partisipasi aktif anak dan kreativitas guru. Namun di lapangan, terutama pada PAUD nonformal, keterbatasan perangkat ajar dan ketidaksiapan guru sering kali menjadi penghambat. Banyak guru PAUD nonformal belum mendapat pelatihan memadai tentang bagaimana menerapkan PJBL secara konsisten dan terarah. Dalam kondisi seperti ini, risiko penyimpangan konsep sangat besar, dan pembelajaran yang seharusnya bermakna bisa menjadi kegiatan rutin tanpa nilai reflektif. Tidak hanya guru, kepala satuan pendidikan juga memegang peran kunci dalam memberikan arah, supervisi, dan motivasi kepada pendidik. Menurut (Lestari, 2024) menekankan bahwa kebijakan kurikulum tidak akan efektif tanpa kepemimpinan yang kuat dan kolaboratif di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini juga mempertimbangkan dimensi kelembagaan yang membentuk atmosfer implementasi kurikulum. Kelembagaan PAUD nonformal di Bandung, yang sangat beragam secara sosial-ekonomi, menjadi ruang analisis penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

Penelitian (Maulida et al., 2024) menyebutkan bahwa pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada guru PAUD sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Dalam konteks PAUD nonformal, akses terhadap pelatihan ini sering tidak merata karena keterbatasan anggaran dan informasi. Guru-guru di jalur nonformal lebih banyak mengandalkan pengalaman praktis dan pengetahuan terbatas dari media sosial atau jejaring komunitas. Hal ini tentu menjadi tantangan serius dalam menjalankan kurikulum yang menuntut pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi dan diferensiasi. Penguatan kapasitas guru PAUD nonformal merupakan aspek krusial yang harus dievaluasi dalam penelitian ini. Tidak cukup hanya memahami isi kurikulum, guru

juga harus mampu merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik anak dan lingkungan. Tanpa hal tersebut, capaian pembelajaran yang diharapkan tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana guru PAUD nonformal mampu memahami dan melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan pendekatan yang tepat.

Menurut (Miftakhi & Pramusinto, 2023) menjelaskan bahwa peningkatan profesionalisme guru PAUD dapat dilakukan melalui diklat berjenjang, namun realisasinya belum menjangkau seluruh satuan nonformal. Pemerataan informasi dan kebijakan pelatihan sering kali tertahan di tataran struktural dinas atau hanya menysar satuan formal. Padahal, guru PAUD nonformal memiliki beban ganda, mulai dari administrasi hingga pengajaran, yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan implementasi antara PAUD formal dan nonformal. Di Kabupaten Bandung sendiri, terdapat ratusan lembaga PAUD nonformal dengan variasi kondisi yang sangat beragam. Evaluasi perlu dilakukan untuk memetakan bagaimana implementasi kurikulum dijalankan dalam konteks nyata lembaga tersebut. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Tanpa adanya pemetaan dan kajian yang spesifik, kebijakan pendidikan akan sulit menjangkau kebutuhan nyata PAUD nonformal.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka di PAUD nonformal. Karena sebagian besar PAUD nonformal berdiri atas dasar inisiatif komunitas, maka dukungan sosial menjadi pilar utama keberlanjutan dan efektivitas pembelajaran. Namun, literasi orang tua tentang Kurikulum Merdeka masih rendah, sehingga tidak semua memahami pentingnya metode baru yang diterapkan oleh guru. Ketidakharmonisan ekspektasi antara orang tua dan pendidik dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kurikulum. Oleh sebab itu, evaluasi ini juga perlu menyentuh dimensi partisipasi dan komunikasi antara guru, anak, dan orang tua. Penelitian (Rahmah et al., 2025) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran anak berdampak positif terhadap perkembangan

kognitif dan sosial. Hasil evaluasi dapat membantu menggambarkan sejauh mana sinergi antara keluarga dan satuan PAUD dalam menyukseskan implementasi kurikulum baru. Dari sini, program-program penguatan kemitraan bisa dikembangkan secara lebih strategis dan kontekstual.

Dalam tataran kebijakan, Kurikulum Merdeka mengamanatkan agar satuan pendidikan diberi keleluasaan dalam merancang kurikulum operasional yang relevan dengan konteks masing-masing. Namun keleluasaan ini justru menimbulkan tantangan baru di satuan PAUD nonformal, di mana tidak semua pendidik memiliki kapasitas untuk menyusun KOSP yang ideal. Keleluasaan tanpa pendampingan dapat melahirkan ketidakteraturan dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi terhadap dokumen-dokumen seperti KOSP, program semester, dan *asesment* anak akan menjadi bagian penting dari penelitian ini. Dokumen tersebut menjadi cerminan kesiapan satuan PAUD dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Hasil evaluasi juga diharapkan menjadi referensi untuk penyusunan panduan atau model kurikulum operasional yang dapat diaplikasikan secara luas oleh lembaga nonformal. Dengan demikian, tidak hanya praktik lapangan yang dievaluasi, tetapi juga sistem pendukung implementasi di tingkat kelembagaan.

Sementara itu, (Tupalessy, 2024) dalam telaah literturnya menyatakan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka menjanjikan perubahan paradigma pembelajaran yang lebih progresif, keberhasilannya sangat ditentukan oleh konteks satuan pendidikan masing-masing. PAUD nonformal di Kabupaten Bandung memiliki kondisi sosial ekonomi yang bervariasi, mulai dari perkotaan padat hingga wilayah pedesaan dengan akses terbatas. Perbedaan ini menuntut pendekatan evaluasi yang sensitif terhadap konteks dan berbasis data lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggambarkan realitas konkret implementasi kurikulum dalam keragaman satuan PAUD nonformal. Dengan menyajikan data empiris dari satuan-satuan pendidikan yang berbeda karakteristik, penelitian ini berpotensi menjadi rujukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan anak usia dini nonformal di Kabupaten Bandung? Rumusan ini akan dijawab melalui kajian menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi oleh satuan PAUD nonformal dalam mengadopsi kurikulum baru.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada satuan PAUD nonformal di Kabupaten Bandung; (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum; serta (3) memberikan gambaran konkret mengenai kesiapan kelembagaan, pendidik, serta dukungan komunitas dalam menjalankan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat basis pengambilan kebijakan dan menyusun strategi penguatan implementasi Kurikulum Merdeka secara lebih merata dan efektif di satuan pendidikan anak usia dini nonformal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada paradigma konstruktivisme, di mana kenyataan dipandang sebagai sesuatu yang jamak, kompleks, dan dibentuk oleh pengalaman subjektif individu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya implementasi Kurikulum Merdeka di satuan PAUD nonformal. Seperti dijelaskan oleh (Sukmadinata, 2005) dan (Siyoto & Sodik, 2015), pendekatan ini cocok untuk memahami realitas sosial yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau generalisasi. Fokus dari penelitian ini adalah eksplorasi mendalam terhadap praktik kurikulum di konteks lokal, sehingga pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menangkap nuansa yang muncul dari perspektif guru dan lembaga pendidikan yang menjadi subjek penelitian.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan fenomena apa adanya tanpa intervensi atau perlakuan khusus. Penelitian deskriptif tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menyajikan informasi rinci mengenai kondisi aktual yang sedang terjadi di lapangan. Teori digunakan sebagai acuan untuk menjaga fokus penelitian tetap sesuai dengan fakta lapangan, sebagaimana diungkapkan oleh (Arikunto, 2005) dan (Ramdhan, 2021). Peneliti berperan aktif dalam keseluruhan proses penelitian, mulai dari menyusun instrumen, melakukan pengamatan, hingga menyusun deskripsi hasil temuan. Penelitian ini bertujuan menyajikan potret implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan PAUD nonformal di Kabupaten Bandung, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Meskipun referensi awalnya menyebut wilayah Jakarta Barat, fokus isi tetap mengarah pada konteks wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana ditetapkan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi awal dan wawancara terstruktur/angket. Observasi digunakan untuk mendata jumlah lembaga PAUD nonformal yang tersebar di Kabupaten Bandung dan memetakan populasi yang relevan sebagai calon responden. Selanjutnya, wawancara dalam bentuk angket *online* disebarakan menggunakan *Google Form* kepada perwakilan dari 31 sekolah PAUD nonformal di Kabupaten Bandung. Pertanyaan dalam angket disusun berdasarkan referensi dari penelitian (Yuliani, 2021), yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini dipilih agar data dapat terkumpul dengan cepat, efisien, dan representatif terhadap kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, kombinasi antara observasi dan angket memberikan gambaran menyeluruh yang diperlukan dalam evaluasi implementasi kebijakan kurikulum di satuan PAUD nonformal. Berikut ini akan disajikan angket pengumpulan data.

Tabel 1. Angket Pengumpulan Data

1. Perencanaan Implementasi Kurikulum Merdeka					
No	Pertanyaan	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak Pernah
1	Saya menyusun berbagai bentuk perencanaan dalam implementasi Kurikulum Merdeka.				

2	Saya masih menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) dalam perencanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka.				
3	Saya mengalami kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran Kurikulum Merdeka.				
4	Saya memiliki solusi untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran.				
No	2. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak Pernah
1	Seberapa sering Kurikulum Merdeka diterapkan secara utuh di PAUD Bapak/ Ibu?				
2	Seberapa sering Bapak/ Ibu mengalami kendala saat menerapkan Kurikulum Merdeka di PAUD Bapak/ Ibu??				
3	Seberapa sering metode pembelajaran tematik dan berbasis proyek digunakan dalam penerapan Kurikulum Merdeka?				
4	Seberapa sering pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak (<i>child-centered</i>) diterapkan saat menggunakan Kurikulum Merdeka?				
5	Seberapa sering media pembelajaran berbasis lingkungan dan digital digunakan dalam mendukung Kurikulum Merdeka?				
6	Seberapa sering Bapak/ Ibu mengalami kesulitan saat melaksanakan pembelajaran sesuai Kurikulum Merdeka?				
8	Seberapa sering Bapak/ Ibu melakukan solusi mandiri atau kolaboratif untuk mengatasi kendala dalam menerapkan Kurikulum Merdeka?				
No	3. Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak Pernah
1	Seberapa sering Bapak/ Ibu menggunakan teknik penilaian autentik seperti observasi, portofolio, dan penilaian proyek dalam Kurikulum Merdeka?				
2	Seberapa sering Bapak/ Ibu menyusun administrasi atau instrumen penilaian (rubrik, lembar observasi, catatan anekdot) sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka?				
3	Seberapa sering Bapak/ Ibu mengalami kesulitan dalam melaksanakan penilaian sesuai dengan pendekatan Kurikulum Merdeka?				
4	Seberapa sering Bapak/ Ibu melakukan upaya atau solusi (seperti diskusi dengan rekan, pelatihan, mencari referensi) untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan penilaian sesuai Kurikulum Merdeka?				

Dalam penelitian kualitatif ini, keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan kredibilitas hasil. Triangulasi digunakan sebagai strategi untuk memverifikasi informasi dari berbagai perspektif, meskipun sumber utama data berasal dari guru PAUD Non Formal di Kabupaten Bandung. Dua jenis triangulasi

diterapkan: triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari beberapa guru dengan latar belakang dan pengalaman berbeda, dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan konsistensi jawaban dalam satu jenis instrumen, yaitu angket. Meskipun teknik pengumpulan data hanya berupa angket, variasi bentuk pertanyaan dalam instrumen memungkinkan validasi internal

antar bagian. Misalnya, membandingkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan pendekatan ini, informasi yang dihasilkan menjadi lebih kaya dan dapat dipercaya karena diuji dari berbagai sudut pandang responden.

Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji konsistensi informasi dari berbagai guru mengenai implementasi Kurikulum Merdeka, kendala, dan solusi yang mereka alami. Dengan membandingkan jawaban dari guru yang berbeda, peneliti dapat melihat kesamaan maupun perbedaan pandangan sebagai indikator keakuratan data. Sedangkan dalam triangulasi teknik, validitas diuji melalui perbandingan antar jawaban dalam angket, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran. Pertanyaan terbuka dan tertutup dianalisis bersama untuk menilai kesesuaian narasi dan frekuensi pilihan, sehingga memperkuat kualitas data. Dengan cara ini, meskipun hanya satu jenis instrumen digunakan, data tetap dapat dianalisis secara berlapis dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang valid.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimulai sejak proses pengumpulan data melalui angket. Data yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan tiga aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran Kurikulum Merdeka. Proses ini dilakukan secara interaktif dan berulang hingga data mencapai titik jenuh, yaitu saat tidak ditemukan lagi informasi baru yang signifikan. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana guru menerapkan prinsip merdeka belajar serta mengidentifikasi kesulitan dan solusi yang mereka lakukan di lapangan. Analisis ini juga diarahkan untuk memahami secara menyeluruh konteks penerapan kurikulum dalam kegiatan sehari-hari di PAUD nonformal.

Terdapat tiga tahap utama dalam analisis data: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring data yang relevan, mengelompokkan berdasarkan frekuensi, dan mengabaikan data yang tidak sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan melalui tabel, grafik dari *Google Form*, serta narasi deskriptif untuk menampilkan pola dan kecenderungan jawaban. Terakhir, kesimpulan ditarik berdasarkan pola dominan

yang muncul dari data, sehingga dapat menggambarkan secara utuh bagaimana Kurikulum Merdeka diimplementasikan oleh guru PAUD nonformal. Hasil akhir diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan mutu implementasi kurikulum di satuan PAUD nonformal, baik untuk praktik maupun kebijakan pendidikan ke depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Lokasi Penelitian

Kabupaten Bandung, sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan anak usia dini, khususnya di jalur nonformal. Terdiri dari 30 kecamatan dengan topografi bervariasi, wilayah ini menyimpan kekayaan alam dan budaya yang kuat. Keragaman geografis, mulai dari dataran rendah hingga wilayah pegunungan, memengaruhi aksesibilitas dan distribusi lembaga pendidikan di berbagai kecamatan. Ibu kota Kabupaten Bandung berada di Soreang, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan koordinasi layanan publik. Letaknya yang berdekatan dengan Kota Bandung mempercepat penyebaran informasi dan pembaruan kebijakan pendidikan. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Bandung sebagai daerah yang representatif dalam menggambarkan dinamika implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di satuan PAUD nonformal. Pemerintah daerah juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap pendidikan anak usia dini melalui berbagai program dan pelatihan. Hal ini menjadikan wilayah ini relevan sebagai lokasi penelitian untuk menggambarkan pelaksanaan kurikulum baru secara komprehensif.

Penelitian ini melibatkan sebanyak 152 satuan PAUD nonformal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. Data dikumpulkan melalui angket daring yang dibagikan menggunakan platform *Google Form*, sehingga memudahkan proses pengisian oleh para responden secara fleksibel. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjangkau lembaga-lembaga yang tersebar, sekaligus memungkinkan partisipasi luas dari berbagai zona geografis. Penggunaan media komunikasi daring seperti *WhatsApp* dan email menjadi strategi utama dalam

mendistribusikan tautan angket. Hasil pengumpulan data menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, mencerminkan antusiasme lembaga PAUD nonformal terhadap evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam proses analisis untuk menilai kesiapan, tantangan, dan keberhasilan lembaga dalam mengadopsi kurikulum tersebut. Jumlah responden yang luas menjadikan hasil penelitian lebih kuat dan representatif.

Latar belakang sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Bandung menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi karakter pelaksanaan pendidikan di PAUD nonformal. Nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal masih dijunjung tinggi, bahkan turut membentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan PAUD. Banyak lembaga PAUD nonformal beroperasi di bawah inisiatif masyarakat desa atau komunitas lokal. Peran tokoh masyarakat dan orang tua sangat signifikan dalam proses pembelajaran dan operasional lembaga. Dukungan moral dan material dari lingkungan sekitar turut memperkuat keberlanjutan lembaga, khususnya di wilayah yang belum terjangkau PAUD formal. Situasi ini memperkuat peran PAUD nonformal sebagai pusat pendidikan berbasis komunitas. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada sinergi antara lembaga pendidikan dan masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pendidikan secara aktif memberikan dukungan pelatihan dan pendampingan kepada guru-guru PAUD, termasuk pada satuan nonformal. Program yang diberikan mencakup pemahaman tentang Kurikulum Merdeka, penyusunan modul ajar, dan penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pemerintah juga memfasilitasi forum komunitas belajar guru yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman antar pendidik. Upaya ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang dinamis, kolaboratif, dan saling mendukung antar-lembaga. Kendati demikian, akses terhadap pelatihan belum sepenuhnya merata, khususnya di daerah dengan keterbatasan jaringan dan transportasi. Namun secara umum, dukungan dari pemerintah telah membentuk landasan yang

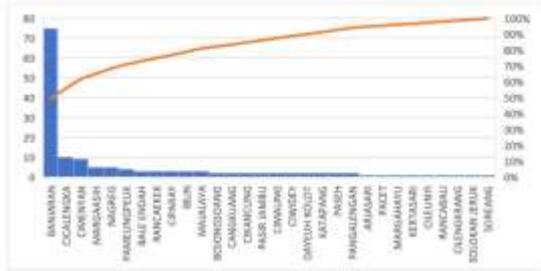
cukup kuat dalam mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di PAUD nonformal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di satuan PAUD nonformal sangat bervariasi, baik dari segi pemahaman guru maupun penerapannya di kelas. Beberapa lembaga sudah mampu menjalankan pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan yang menyenangkan sesuai prinsip kurikulum. Namun, masih ada lembaga yang memerlukan pelatihan lanjutan dan bimbingan teknis lebih intensif. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta belum meratanya informasi menjadi tantangan utama dalam proses ini. Penyesuaian terhadap kurikulum juga bergantung pada kapasitas internal masing-masing lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran penting tentang kesenjangan yang ada dan kebutuhan pendampingan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Satuan PAUD nonformal yang menjadi subjek penelitian umumnya telah memiliki legalitas dan aktif menjalankan kegiatan pembelajaran. Mereka berperan besar dalam menjangkau anak-anak usia dini yang tidak terlayani oleh lembaga PAUD formal, khususnya di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah. Banyak dari lembaga ini telah menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak, yang ternyata selaras dengan semangat Kurikulum Merdeka. Penyesuaian dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kapasitas pendidik, kebutuhan anak, dan ketersediaan sumber daya. Penelitian ini memberikan informasi detail tentang bagaimana lembaga-lembaga tersebut mengadopsi dan mengimplementasikan kurikulum baru secara nyata di lapangan. Data dari angket juga mencerminkan kesiapan dan hambatan masing-masing satuan PAUD dalam menjalankan proses pembelajaran.

Wilayah geografis Kabupaten Bandung yang terdiri dari dataran rendah dan pegunungan turut memengaruhi akses terhadap pelatihan dan pelaksanaan program pendidikan. Daerah pegunungan cenderung memiliki keterbatasan dalam jaringan komunikasi dan transportasi, namun semangat para pendidik tetap tinggi. Beberapa guru bahkan menciptakan inovasi lokal untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lingkungan mereka. Kolaborasi antara lembaga dan orang tua menjadi kunci utama

dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Kabupaten Bandung, dengan keanekaragaman sosial-budaya dan geografisnya, memberikan gambaran lengkap tentang dinamika pelaksanaan Kurikulum Merdeka di PAUD nonformal. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pendidikan PAUD yang lebih adil dan kontekstual, baik di tingkat daerah maupun nasional.



Gambar 1. Grafik Pengisian Angket

Hasil Penelitian

Implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan bagian dari transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional yang menekankan fleksibilitas, diferensiasi, dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi kurikulum ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi sangat bergantung pada kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satu fondasi utama dalam keberhasilan Kurikulum Merdeka adalah perencanaan yang matang dan terarah, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak usia dini. Penting untuk memahami sejauh mana perencanaan ini sudah dijalankan secara nyata oleh para guru di lapangan. Data yang diperoleh dari satuan PAUD se-Kabupaten Bandung memberikan gambaran empiris mengenai kondisi faktual perencanaan implementasi Kurikulum Merdeka. Hasil ini perlu ditelaah secara mendalam dan dibandingkan dengan teori serta regulasi yang berlaku, untuk menilai apakah proses yang berjalan sudah sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Berikut adalah uraian lengkap terkait hasil perencanaan implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan data yang diperoleh.

Perencanaan Implementasi Kurikulum Merdeka

Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Perencanaan yang baik akan mempermudah guru dalam menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam konteks pendidikan anak usia dini (PAUD), perencanaan harus disesuaikan dengan perkembangan anak dan prinsip pembelajaran holistik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kuat dari pendidik dalam menyusun perangkat ajar yang tidak hanya administratif tetapi juga substantif. Hasil pengumpulan data dari sekolah-sekolah di Kabupaten Bandung menunjukkan variasi dalam tingkat keterlaksanaan perencanaan tersebut. Melalui instrumen angket yang dibagikan, diperoleh enam indikator utama yang mengukur sejauh mana perencanaan Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan. Rincian data disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Perencanaan Implementasi Kurikulum Merdeka

No	Perencanaan Implementasi Kurikulum Merdeka	1	2	3	4	Total Keseluruhan Skor	Interpretasi Nilai
1	Saya menyusun berbagai bentuk perencanaan dalam implementasi Kurikulum Merdeka.	0	46	37	69	479	78,78
2	Saya masih menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar dalam perencanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka.	0	55	44	73	494	81,25
3	Saya mengalami kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran Kurikulum Merdeka.	9	118	22	3	323	53,13
4	Saya memiliki solusi untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran.	0	75	56	27	408	67,11
5	Seberapa sering Kurikulum Merdeka diterapkan secara utuh di PAUD Bapak/ Ibu?	0	29	77	46	473	77,88
6	Seberapa sering Bapak/ Ibu mengalami kendala saat menerapkan Kurikulum Merdeka di PAUD Bapak/ Ibu??	7	106	31	6	342	56,25

Keterangan:

1. Total Sekolah yang Menjawab 'Sering'
2. Total Sekolah yang Menjawab 'Kadang-kadang'
3. Total Sekolah yang Menjawab 'Jarang'
4. Total Sekolah yang Menjawab 'Tidak Pernah'

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka di PAUD Nonformal di Kabupaten Bandung masih tergolong dalam kategori cukup, dengan skor rata-rata antara 50 hingga 80. Pada indikator pertama, sebanyak 46 sekolah menyatakan “kadang-kadang” menyusun bentuk perencanaan pembelajaran, sedangkan belum ada yang menjawab “sering”, sehingga skor interpretasi hanya mencapai 78,78. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan perangkat ajar oleh guru belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Padahal, Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya rancangan

pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berfokus pada kebutuhan anak (Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman kurikulum oleh guru belum sepenuhnya terinternalisasi, kemungkinan akibat kurangnya pelatihan dan sosialisasi di tingkat satuan pendidikan.

Pada indikator kedua, masih banyak guru yang mempertahankan penggunaan RPP lama dibandingkan menggunakan modul ajar yang dianjurkan dalam Kurikulum Merdeka. Tercatat 73 sekolah menjawab tidak pernah menggunakan modul ajar, dan hanya sedikit yang mulai beralih. Dengan nilai interpretasi sebesar 81,25, tampak bahwa perencanaan masih belum mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada proses. Menurut (Arifin, 2023), kondisi ini disebabkan oleh ketidaksiapan guru dalam menerjemahkan kurikulum baru ke dalam perangkat ajar yang aplikatif. Kesulitan dalam merancang modul ajar ini diperparah oleh terbatasnya contoh atau referensi modul yang sesuai dengan konteks lokal. Guru akhirnya memilih bertahan menggunakan pola lama yang dianggap lebih mudah, meskipun tidak sejalan dengan filosofi Kurikulum Merdeka.

Indikator ketiga hingga kelima mengonfirmasi bahwa sebagian besar guru mengalami kesulitan dalam menyusun perangkat ajar Kurikulum Merdeka, dengan skor interpretasi hanya 53,13. Kesulitan ini mencakup pemahaman substansi kurikulum, keterampilan mendesain kegiatan belajar aktif, hingga penguasaan teknis penggunaan modul ajar. Menurut (Yuliani, 2021), kendala semacam ini umum terjadi ketika guru tidak memiliki kecakapan pedagogis untuk mengintegrasikan kebutuhan anak dengan rancangan pembelajaran. Meski demikian, terdapat inisiatif dari sebagian guru untuk mengatasi tantangan tersebut melalui pembelajaran mandiri dan komunitas guru. Skor sebesar 67,11 pada indikator solusi mandiri menunjukkan bahwa praktik kolaboratif mulai berkembang, sejalan dengan teori Vygotsky tentang *Zone of Proximal Development*, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pengembangan profesional pendidik.

Terakhir, pada indikator keenam terkait penerapan Kurikulum Merdeka secara utuh, sebagian besar sekolah hanya menjalankannya

“kadang-kadang” dengan skor 77,80. Belum menyeluruhnya implementasi ini mengindikasikan bahwa Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya menjadi budaya pembelajaran di satuan PAUD. Padahal, sesuai Permendikbudristek No. 12 Tahun 2022, satuan pendidikan diberikan fleksibilitas untuk mengadopsi kurikulum ini secara bertahap, namun tetap diarahkan untuk mencapai pembelajaran yang kontekstual dan berpusat pada anak. Selain itu, guru masih banyak mengalami kendala struktural, seperti keterbatasan media ajar, waktu, dan pemahaman, dengan skor interpretasi 56,25. Penelitian (Rahmawati & Sutini, 2022) juga mempertegas bahwa kesiapan SDM menjadi faktor dominan dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah daerah melalui pelatihan berkelanjutan yang responsif terhadap kebutuhan PAUD lokal.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka di satuan PAUD tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pelaksanaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum. Pelaksanaan menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa rancangan pembelajaran benar-benar dapat berdampak pada perkembangan anak secara optimal. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang tematik, berbasis proyek, berpusat pada anak, dan didukung oleh penggunaan media yang kontekstual, termasuk teknologi digital. Keberhasilan pelaksanaan dapat dilihat dari sejauh mana pendidik mampu menerapkan pendekatan tersebut secara konsisten di kelas. Namun, dalam kenyataan di lapangan, pelaksanaan kerap kali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pemahaman guru, sarana prasarana, hingga dukungan lingkungan. Untuk mengetahui kondisi tersebut, dilakukan survei di berbagai satuan PAUD se-Kabupaten Bandung guna memperoleh data akurat yang dapat dibandingkan dengan standar ideal pelaksanaan Kurikulum Merdeka menurut regulasi nasional. Tabel berikut menyajikan hasil rekapitulasi pelaksanaan kurikulum berdasarkan empat indikator utama.

Tabel 3. Hasil Responden Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

No.	Pelaksanaan Kurikulum Merdeka	1	2	3	4	Total Keseluruhan Skor	Interpretasi Nilai
1	Seberapa sering metode pembelajaran tematik dan berbasis proyek digunakan dalam penerapan Kurikulum Merdeka?	5	67	62	20	403	66,28
2	Seberapa sering pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak (<i>child-centered</i>) diterapkan saat menggunakan Kurikulum Merdeka?	2	23	72	53	480	78,95
3	Seberapa sering media pembelajaran berbasis lingkungan dan digital digunakan dalam mendukung Kurikulum Merdeka?	2	58	72	20	414	68,09
4	Seberapa sering Bapak/ Ibu mengamati kesulitan saat melaksanakan pembelajaran sesuai Kurikulum Merdeka?	9	112	27	4	330	54,28

Keterangan:

1. Total Sekolah yang Menjawab 'Sering'
2. Total Sekolah yang Menjawab 'Kadang-kadang'
3. Total Sekolah yang Menjawab 'Jarang'
4. Total Sekolah yang Menjawab 'Tidak Pernah'

Pelaksanaan metode pembelajaran tematik dan berbasis proyek memperoleh skor rata-rata sebesar 66,28 yang berada dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan PAUD di Kabupaten Bandung telah mencoba menerapkan pendekatan tersebut, meskipun belum dilakukan secara menyeluruh. Berdasarkan panduan dari (Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, 2022), pembelajaran berbasis proyek merupakan bagian integral dalam penguatan karakter dan pengembangan kompetensi siswa, yang harus dilaksanakan secara rutin. Namun, data menunjukkan masih ada sejumlah sekolah yang menjawab "jarang" atau bahkan "tidak pernah", yang mengindikasikan perlunya peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam merancang serta mengimplementasikan proyek tematik.

Pada indikator kedua, yakni penerapan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak (*child-centered*), skor rata-rata mencapai 78,95. Skor ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik telah memahami dan mulai menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Menurut teori *Montessori* dan *Piaget*, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak sangat penting untuk memfasilitasi tumbuh kembang yang optimal (Suyadi, 2015). Meski begitu, jumlah responden yang menyatakan "jarang" dan "tidak pernah" juga cukup tinggi,

menandakan masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktik implementasi di lapangan.

Penggunaan media pembelajaran berbasis lingkungan dan digital memperoleh skor rata-rata sebesar 68,09 yang juga berada dalam kategori cukup. Hasil ini menunjukkan bahwa integrasi media berbasis teknologi dan kontekstual ke dalam pembelajaran masih belum optimal. Padahal, dalam konteks Kurikulum Merdeka, pemanfaatan lingkungan sekitar dan perangkat digital merupakan bagian dari strategi pembelajaran diferensiasi (Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, 2022). Keterbatasan perangkat, keterampilan guru dalam mengelola teknologi, serta akses terhadap infrastruktur digital kemungkinan menjadi faktor penyebab lemahnya penerapan indikator ini di sebagian besar satuan PAUD.

Indikator terakhir menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran sesuai Kurikulum Merdeka, dengan skor rata-rata 54,28. Nilai ini termasuk dalam kategori rendah dan menunjukkan bahwa sebagian besar guru menghadapi tantangan nyata dalam menerapkan kurikulum secara penuh. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Fitriani & Yulianti, 2023) yang menyebutkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah rendahnya pemahaman terhadap prinsip kurikulum serta keterbatasan waktu untuk merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai. Diperlukan intervensi kebijakan berupa pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis dari dinas pendidikan atau instansi terkait.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Bandung masih berada dalam tahap transisi dan penyesuaian. Meskipun sudah ada indikasi penerapan beberapa prinsip utama, namun pelaksanaannya belum merata dan konsisten di semua satuan PAUD. Disparitas ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang lebih sistematis dan terarah dalam mengintegrasikan Kurikulum Merdeka ke dalam rutinitas pembelajaran harian. Perlu adanya penguatan kapasitas guru, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas pendidikan, dan masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan kurikulum yang ideal.

Hasil ini menegaskan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya sinergi antara kebijakan nasional dan dukungan implementatif di level satuan pendidikan. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menyediakan berbagai sumber daya seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan modul ajar digital yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Namun, jika tidak diiringi dengan penguatan literasi digital, peningkatan kompetensi pedagogis, serta monitoring yang berkelanjutan, maka kebijakan tersebut berisiko tidak berdampak signifikan di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi rutin dan tindak lanjut berbasis data seperti yang dilakukan dalam kajian ini sangat penting untuk memperbaiki implementasi Kurikulum Merdeka ke depan.

Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka

Evaluasi merupakan komponen akhir namun sangat krusial dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka. Tanpa adanya evaluasi, satuan PAUD tidak dapat mengetahui sejauh mana pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi dalam konteks Kurikulum Merdeka meliputi penggunaan teknik penilaian autentik, penyusunan instrumen sesuai prinsip kurikulum, serta upaya pendidik dalam mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Penilaian tidak lagi hanya mengukur hasil akhir, melainkan harus mencerminkan proses belajar anak secara holistik dan kontekstual. Penting untuk mengetahui sejauh mana pendidik PAUD di Kabupaten Bandung telah menjalankan evaluasi sesuai prinsip Kurikulum Merdeka. Selain itu, bagian ini juga mengukur tingkat kesulitan yang dialami guru dalam melakukan penilaian serta inisiatif mereka dalam mencari solusi yang tepat. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi dari aspek evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka berdasarkan lima indikator utama.

Tabel 4. Hasil Responden Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka

No	Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka	1	2	3	4	Total Kecenderungan Skor	Interpro- test Nilai
1	Seberapa sering Bapak/ Ibu melakukan solusi mandiri atau kolaboratif untuk mengatasi kendala dalam menerapkan Kurikulum Merdeka?	1	71	38	22	405	66,61384
2	Seberapa sering Bapak/ Ibu menggunakan teknik penilaian autentik seperti observasi, portofolio, dan penilaian proyek dalam Kurikulum Merdeka?	0	52	66	34	438	72,03947
3	Seberapa sering Bapak/ Ibu menyesuaikan administrasi atau instrumen penilaian (rubrik, lembar observasi, catatan anekdot) sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka?	2	59	61	35	433	71,21711
4	Seberapa sering Bapak/ Ibu mengatur suasana dalam melaksanakan penilaian sesuai dengan pendekatan Kurikulum Merdeka?	12	103	30	7	336	55,26316
5	Seberapa sering Bapak/ Ibu melakukan upaya atau solusi (seperti diskusi dengan rekan, pelatihan, mencari referensi) untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan penilaian sesuai Kurikulum Merdeka?	1	50	70	31	431	71,54605

Keterangan:

1. Total Sekolah yang Menjawab 'Sering'
2. Total Sekolah yang Menjawab 'Kadang-kadang'
3. Total Sekolah yang Menjawab 'Jarang'
4. Total Sekolah yang Menjawab 'Tidak Pernah'

Indikator pertama menyoroti sejauh mana guru melakukan solusi mandiri atau kolaboratif dalam menghadapi kendala pelaksanaan Kurikulum Merdeka, dengan skor rata-rata sebesar 66,61. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pencarian solusi oleh pendidik tergolong cukup, namun belum dilakukan secara intensif dan konsisten. Padahal, prinsip Kurikulum Merdeka mendorong kolaborasi antar guru dalam komunitas belajar untuk mencari solusi bersama atas kendala teknis dan konseptual (Kemendikbud, 2022). Rendahnya angka pada kategori “*sering*” menandakan kurangnya budaya refleksi dan diskusi kolektif di lingkungan sekolah. Selain itu, belum optimalnya dukungan struktural seperti pelatihan dan pendampingan juga dapat memperlemah inisiatif guru. Sebuah penelitian oleh (Wulandari, 2023) menunjukkan bahwa guru yang aktif dalam komunitas belajar lebih siap menghadapi tantangan implementasi kurikulum. Peningkatan partisipasi dalam forum diskusi dan pelatihan menjadi langkah penting dalam memperkuat evaluasi yang solutif.

Indikator kedua mengukur penggunaan teknik penilaian autentik seperti observasi, portofolio, dan proyek, yang memperoleh skor rata-rata 72,04 dan berada dalam kategori baik. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah mulai menggunakan pendekatan evaluasi yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Penilaian autentik dianggap lebih mencerminkan kemampuan nyata anak karena melibatkan proses dan produk belajar secara menyeluruh (Purnomo, 2021). Meski demikian, persentase yang cukup besar pada

kategori “*jarang*” dan “*tidak pernah*” menunjukkan bahwa pemahaman serta keterampilan dalam melaksanakan penilaian ini masih perlu ditingkatkan. Idealnya, penilaian dilakukan dalam konteks keseharian anak melalui dokumentasi aktivitas yang relevan. Kurangnya pelatihan praktis terkait teknik penilaian autentik menjadi salah satu kendala yang perlu segera ditangani. Penting bagi lembaga PAUD untuk menyusun program peningkatan kompetensi penilaian bagi pendidik secara berkelanjutan.

Penyusunan administrasi atau instrumen penilaian seperti rubrik, lembar observasi, dan catatan anekdot menunjukkan skor 71,22 yang mengindikasikan kinerja cukup baik dari guru. Instrumen tersebut merupakan komponen penting dalam evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada proses dan bukan semata hasil akhir. Dalam Kurikulum Merdeka, dokumen penilaian berfungsi sebagai alat dokumentasi perkembangan anak serta dasar untuk refleksi dan tindak lanjut pembelajaran (Kemendikbud, 2022). Sayangnya, masih ada sekitar sepertiga responden yang belum secara konsisten menyusun instrumen ini, yang mengindikasikan perlunya peningkatan literasi administrasi penilaian. Faktor seperti beban kerja administratif yang tinggi dan kurangnya waktu bisa menjadi penghambat. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi atau sistem digital sederhana bisa menjadi alternatif solusi untuk efisiensi penyusunan administrasi. Pelatihan teknis terkait penyusunan rubrik berbasis kompetensi juga sangat dibutuhkan agar guru dapat menilai secara objektif dan terstruktur.

Kesulitan dalam melakukan penilaian sesuai pendekatan Kurikulum Merdeka menjadi indikator keempat yang memiliki skor cukup rendah, yaitu 55,26. Rendahnya skor ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih menghadapi tantangan signifikan dalam pelaksanaan penilaian berbasis proses dan autentik. Kesulitan ini bisa disebabkan oleh belum terbiasanya guru dengan pendekatan baru yang menuntut observasi intensif, analisis perkembangan, serta dokumentasi yang mendalam. Dalam kajian (Sari & Mulyani, 2022), ditemukan bahwa sebagian besar guru PAUD merasa kesulitan mengaitkan kegiatan bermain dengan indikator capaian pembelajaran secara konkret. Hal ini menunjukkan pentingnya

pelatihan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif melalui simulasi dan praktik langsung. Pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif dengan menyelenggarakan bimbingan teknis secara rutin. Upaya ini penting agar beban kesulitan yang dirasakan guru tidak menghambat kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

Indikator terakhir menilai upaya atau solusi guru dalam menghadapi kesulitan penilaian, baik melalui diskusi, pelatihan, atau pencarian referensi, dengan skor rata-rata 71,55. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru telah menunjukkan inisiatif untuk mengatasi hambatan penilaian meskipun belum dilakukan secara merata. Menurut teori belajar sosial oleh Bandura, lingkungan belajar kolaboratif dapat memotivasi individu untuk berkembang melalui proses observasi dan interaksi. Dalam konteks PAUD, kegiatan seperti pelatihan, diskusi kelompok kerja guru (KKG), serta pencarian sumber belajar dari platform digital merupakan bentuk implementasi konkret dari teori tersebut. Perlu diperkuat kultur belajar sepanjang hayat bagi guru agar mereka terus mengembangkan kompetensinya. Penyediaan akses terhadap sumber belajar yang kredibel juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, upaya evaluatif yang dilakukan guru dapat lebih berdampak pada peningkatan kualitas implementasi kurikulum.

Secara keseluruhan, evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka di PAUD Kabupaten Bandung menunjukkan capaian yang cukup, dengan beberapa indikator yang mendekati kategori baik. Namun, masih terdapat ketimpangan antara pemahaman konseptual dan pelaksanaan praktis, khususnya dalam penilaian autentik dan penyusunan instrumen. Upaya penyelesaian masalah secara mandiri maupun kolaboratif sudah mulai dilakukan, tetapi masih perlu dorongan kebijakan yang lebih kuat untuk memperluas dampaknya. Evaluasi seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan proses reflektif dan *solutif* yang terus-menerus dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan sistemik dari dinas pendidikan, penyediaan pelatihan berkualitas, serta pendampingan secara personal agar guru merasa terbantu. Jika evaluasi dilaksanakan dengan baik, maka Kurikulum Merdeka dapat

memberikan dampak nyata bagi perkembangan anak usia dini. Keterpaduan antara pelatihan, praktik lapangan, dan evaluasi yang reflektif menjadi kunci sukses implementasi Kurikulum Merdeka di masa depan.

Kendala dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan PAUD Non Formal

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada para pendidik PAUD non formal di Kabupaten Bandung, ditemukan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kendala-kendala ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, sebagai berikut:

Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sebagian besar responden menyebutkan bahwa fasilitas yang dimiliki lembaga masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka. Beberapa pernyataan yang muncul antara lain: "Sarana dan prasarana belum lengkap." "Minimnya alat edukatif dan media pembelajaran." "Hanya tersedia satu laptop untuk semua guru." "Kegiatan P5 sulit dijalankan karena fasilitas terbatas."

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur pendidikan menjadi hambatan utama dalam implementasi pembelajaran yang berpusat pada anak.

Kurangnya Pemahaman Guru terhadap Kurikulum Merdeka

Sejumlah guru mengaku belum memahami secara utuh konsep dan prinsip Kurikulum Merdeka, khususnya dalam hal penyusunan modul ajar, penerapan diferensiasi pembelajaran, serta penilaian autentik. Pernyataan yang ditemukan antara lain: "Masih belum paham secara menyeluruh." "Perlu adaptasi lebih karena berbeda dengan kurikulum sebelumnya." "Sering masih menyelipkan pendekatan dari kurikulum lama (K13)."

Hal ini memperkuat pentingnya pelatihan dan pendampingan teknis berkelanjutan bagi tenaga pendidik.

Perbedaan Persepsi antar Pendidik dan Stakeholder

Perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap Kurikulum Merdeka antara guru, kepala sekolah, hingga orang tua menjadi hambatan lain yang cukup menonjol. Beberapa responden menyampaikan: "Masih

ada beda persepsi antara guru dengan kepala sekolah." "Orang tua mempertanyakan mengapa anak-anak hanya bermain." "Nenek yang mengantar anak tidak memahami konsep belajar sambil bermain."

Ketidaksamaan pemahaman ini menghambat pelaksanaan kurikulum secara konsisten di lingkungan lembaga.

Keterbatasan Media dan APE (Alat Permainan Edukatif)

Para guru juga menyoroti pentingnya keberagaman alat permainan sebagai sarana belajar yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Beberapa tanggapan yang muncul: "Mainannya harus beragam, anak-anak sering berebut." "Kendalanya minim alat peraga, butuh APE yang bervariasi." "Kurang media pembelajaran yang interaktif."

Kompetensi Guru dalam Mengelola Pembelajaran

Guru merasa dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan mampu mengelola perbedaan kemampuan siswa. Beberapa kendala yang diungkapkan: "Kesulitan menentukan media sesuai minat anak." "Guru baru masih butuh jam terbang." "Guru perlu peningkatan keterampilan digital."

Tantangan Teknis Digital dan IT

Dalam aspek teknologi, banyak lembaga masih terbatas pada perangkat digital dasar. Tantangan yang dihadapi meliputi: "Guru tidak semua punya laptop." "Media digital rusak atau tidak bisa digunakan." "Internet terbatas."

Keterlibatan Orang Tua yang Masih Rendah

Peran serta orang tua dalam mendukung pelaksanaan kurikulum masih belum maksimal. Guru menyampaikan: "Kurangnya dukungan dari orang tua." "Perbedaan pemikiran dengan wali murid." "Orang tua belum paham pendekatan baru Kurikulum Merdeka."

Kesulitan dalam Penyusunan dan Pelaksanaan RPPH serta Proyek P5

Banyak guru mengaku mengalami kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasikan kegiatan berbasis proyek, maupun dalam menyusun administrasi pembelajaran. Tanggapan guru meliputi: "Pembuatan proyek P5 masih bingung." "Menentukan kegiatan yang sesuai dengan karakter anak cukup menantang." "Waktu yang tersedia tidak cukup untuk semua kegiatan."

Kendala Perilaku dan Adaptasi Anak

Beberapa guru menghadapi tantangan dalam membimbing anak-anak yang masih belum terbiasa dengan model pembelajaran fleksibel. Keluhan yang muncul: “Anak-anak belum terbiasa memilih kegiatan sendiri.” “Masih sulit mengatur anak yang berbeda karakter.” “Anak mudah bosan atau sulit fokus.”

Guru Belum Konsisten atau Kesulitan Kolaborasi

Beberapa lembaga menyebut adanya perbedaan semangat dan pemahaman antar guru, sehingga dibutuhkan refleksi dan penyamaan persepsi secara berkala. “Masih ada guru yang merasa Kurikulum Merdeka merepotkan.” “Harus sering diskusi untuk menyamakan pemahaman.” “Kolaborasi antar guru perlu ditingkatkan.”

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dalam aspek perencanaan pembelajaran di PAUD Kabupaten Bandung masih belum optimal. Sebagian besar guru belum menyusun perangkat ajar sesuai prinsip fleksibilitas dan kemandirian belajar anak. Perangkat pembelajaran yang digunakan masih cenderung konvensional, berupa RPP lama, dan belum sepenuhnya digantikan oleh modul ajar Kurikulum Merdeka. Tingkat pemahaman terhadap filosofi kurikulum juga masih rendah, sehingga penyusunan rencana pembelajaran kurang kontekstual. Padahal, berdasarkan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024, satuan PAUD dituntut untuk menyusun rencana pembelajaran yang relevan dengan kondisi anak dan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan intensif.

Pada aspek pelaksanaan pembelajaran, guru belum sepenuhnya menerapkan pendekatan tematik, berbasis proyek, dan berpusat pada anak secara konsisten. Banyak kegiatan belajar masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik anak usia dini. Meskipun beberapa lembaga memiliki fasilitas media digital dan lingkungan belajar yang mendukung, pemanfaatannya masih belum maksimal. Hal ini selaras dengan temuan Rahmawati (2023) yang menunjukkan bahwa guru PAUD masih kesulitan dalam mengadaptasi pendekatan pembelajaran

Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran memerlukan supervisi dan dukungan berkelanjutan dari dinas pendidikan agar guru dapat mengimplementasikan strategi belajar yang lebih sesuai dengan kurikulum baru.

Sementara itu, pada aspek evaluasi, guru masih menghadapi tantangan dalam menerapkan asesmen autentik seperti observasi, portofolio, dan catatan anekdot. Penilaian yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum mendalam untuk memahami perkembangan anak secara utuh. Selain itu, kesulitan juga ditemukan dalam penyusunan instrumen penilaian yang berbasis proses dan reflektif. Permasalahan umum yang teridentifikasi mencakup rendahnya pemahaman kurikulum, minimnya pelatihan teknis, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya budaya refleksi kolektif antar guru. Secara keseluruhan, implementasi Kurikulum Merdeka di PAUD Kabupaten Bandung masih dalam tahap adaptasi, dan membutuhkan penguatan kapasitas guru, peningkatan sarana prasarana, serta strategi kebijakan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2023). Kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 7(2), 112–124. <https://doi.org/10.12345/jpud.v7i2.5678>
- Arikunto, S. (2005). *Prosedur penelitian: Pendekatan praktis*. Rineka Cipta.
- Awwalina, A. F., Farantika, D., & Rachmah, L. L. (2024). Penerapan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran di lembaga PAUD. *Jurnal CARE: Children Advisory Research and Education*, 12(1). <https://doi.org/10.25273/jcare.v12i1.19902>
- Fitriani, N., & Yulianti, D. (2023). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka pada pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia*, 8(1), 55–67. <https://doi.org/10.12345/jpaudi.v8i1.12345>
- Junaedah, T., Sumarno, S., & Dwijayanti, I. (2024). Strategi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di satuan PAUD melalui pendekatan Project Based Learning (PJBL). *Tematik: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 3(1), 16–21. <https://doi.org/10.57251/tem.v3i1.1397>

- Kemendikbud. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen: Kurikulum Merdeka untuk PAUD*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, K. (2022). *Permendikbudristek No. 12 Tahun 2022 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*.
- Lestari, M. (2024). Telaah kritis guru terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan PAUD. *PERNIK*, 7(1), 43–51. <https://doi.org/10.31851/pernik.v7i1.15582>
- Maulida, I., Azizah, N., Rahmatullah, A. A., Anggraini, A., Saepurohman, M. J., & Sukiman, S. (2024). Upaya penguatan Kurikulum Merdeka untuk pendidik PAUD. *Ainara Journal*, 5(1), 18–25. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i1.339>
- Miftakhi, D. R., & Pramusinto, H. (2023). *Meningkatkan profesionalisme pendidik PAUD melalui pelatihan berjenjang*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7618997>
- Purnomo, A. (2021). Penilaian autentik dalam pendidikan anak usia dini: Konsep dan praktik. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(2), 125–135. <https://doi.org/10.12345/jpa.v10i2.4567>
- Rahmah, A. N., Feliana, M., Musarofah, & Safitri, D. (2025). Mewujudkan Indonesia Emas: Praktik dan strategi asesmen dalam pembelajaran PAUD dengan Kurikulum Merdeka di TK Ukan Hasupa. *Early Childhood Journal*, 5(1), 38–47. <https://doi.org/10.30872/ecj.v5i1.4534>
- Rahmawati, N., & Sutini, T. (2022). Faktor-faktor keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di PAUD. *Jurnal Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 41–55. <https://doi.org/10.56789/jipaud.v5i1.4321>
- Ramadhan, M. F. (2021). *Metodologi penelitian dalam bidang pendidikan*. Alfabeta.
- Sari, D. F., & Mulyani, E. (2022). Analisis kesulitan guru dalam implementasi penilaian autentik berbasis Kurikulum Merdeka di PAUD. *Jurnal Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 88–97. <https://doi.org/10.56789/jipaud.v6i1.7890>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar-dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Suyadi. (2015). *Teori pembelajaran anak usia dini dalam pandangan Montessori & Piaget*. Pedagogia.
- Tupalessy, P. (2024). Tinjauan pustaka tentang penerapan Kurikulum Merdeka dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia. *HUELE Journal of Applied Linguistics, Literature and Culture*, 4(1), 49–54. <https://doi.org/10.30598/huele.v4.i1.p49-54>
- Wulandari, I. P. (2023). Efektivitas komunitas belajar dalam meningkatkan kesiapan guru PAUD menghadapi Kurikulum Merdeka. *Jurnal PAUD Nusantara*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/10.67890/jpn.v5i1.1234>
- Yuliani, N. S. (2021). *Pembelajaran aktif dalam pendidikan anak usia dini: Teori dan praktik*. Alfabeta.